

SKRIPSI

**PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA 2.0 DALAM
MELAPORKAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA DI
NAGARI KOTO MALINTANG KABUPATEN AGAM**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

AULIYA RAHMI
1810112137

Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara (PK VII)



Pembimbing :

Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn
Gusminarti, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 9/PK-VII/IV/2024

ABSTRAK

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah aplikasi yang dirancang dan dikembangkan secara bersama-sama oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kementerian Dalam Negeri menghimbau seluruh desa untuk menggunakan aplikasi Siskeudes melalui SE-MENDAGRI Nomor 145/8350/BPD serta SE-KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016. Dalam pengembangan aplikasi Siskeudes ini, pemerintah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Salah satu kegunaan dari aplikasi ini adalah dalam melaporkan pertanggungjawaban mengenai penggunaan dan pengelolaan keuangan desa. Dengan anggaran yang sangat besar setiap tahunnya, maka dari itu perangkat desa juga mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memberikan pertanggungjawaban laporannya. Setiap perangkat desa harus mampu memahami penggunaan aplikasi ini agar nantinya tidak terjadi kesalahan dalam memberikan laporan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diambil: 1) Bagaimana prosedur pelaporan keuangan desa dengan aplikasi sistem keuangan desa dan 2) Apa permasalahan yang ditemui dalam melaporkan pertanggungjawaban keuangan desa dengan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa di Nagari Koto Malintang. Untuk penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara dengan pihak-pihak terkait di Nagari Koto Malintang dan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen serta studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penulis menemukan bahwasanya tidak ada peraturan atau undang-undang khusus yang mengatur tentang penggunaan aplikasi ini. Hanya saja, pelaksanaan penggunaan aplikasi ini didukung oleh instruksi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, pengembangan Aplikasi Siskeudes ini sangat membantu pengelolaan keuangan desa, selain memberi dukungan terhadap pemerintah desa dalam tata kelola keuangan, aplikasi ini membantu pemerintah dalam mengontrol pengelolaan keuangan desa. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah permasalahan sumber daya manusia, struktur birokrasi, dan pemenuhan azas transparansi.

Kata kunci: *Penggunaan Aplikasi Siskeudes, Keuangan Desa, Pertanggungjawaban keuangan Desa*